



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 25 September 2014

Nomor : 1573/SJ/IX/2014 Yth. 1. Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas
Sifat : Segera 2. Direktur Anggaran II Kemenkeu
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Renja Dalam di-
Rangka Penyempurnaan dan Jakarta
Penambahan Output Pada
RKA K/L KPU Tahun
Anggaran 2015.

Menyusuli surat kami nomor 1448/SJ/IX/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Usulan Perbaikan/Penyempurnaan dan Penambahan Output Dalam RKA K/L KPU TA 2014 dan menindaklanjuti hasil rapat penyempurnaan output dalam RKA K/L KPU TA 2015 yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 22 September 2014, sesuai dengan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA K/L 2015, bahwa KPU diminta untuk memperbaiki rencana kerja (Renja) tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan dokumen perubahan Renja KPU TA 2015 sebagai bahan dalam perubahan/penyempurnaan dan penambahan output pada RKA K/L KPU TA 2015. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2015, Pagu Alokasi Anggaran telah diterbitkan dan proses penyusunan RKA K/L TA 2015 selambat-lambatnya disampaikan ke Kemenkeu pada akhir bulan September 2014. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon dapat segera memproses persetujuan penyempurnaan output dimaksud.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan :

Yth. Bapak Ketua KPU.



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Nama Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum

3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
02	Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab
03	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif
04	Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
05	Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

4. Sasaran Strategis :

No	Mendukung Sasaran Strategis
04	Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
05	Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai

5. Kode Program : 076.01.01

6. Nama Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2014	Usulan Tahun 2015	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Rupiah		937,199.0			
a. Pendamping		0.0			
b. Non Pendamping		937,199.0			
2. PHLN atau PDN		0.0			
JUMLAH	0.0	937,199.0	957,484.6	1,005,358.8	1,055,626.8

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/OutCome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	01 Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Nama Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum

3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
02	Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab
03	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif
04	Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
05	Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

4. Sasaran Strategis :

No	Mendukung Sasaran Strategis
04	Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5. Kode Program : 076.01.02

6. Nama Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2014	Usulan Tahun 2015	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Rupiah		100,000.0			
a. Pendamping		0.0			
b. Non Pendamping		100,000.0			
2. PHLN atau PDN		0.0			
JUMLAH	0.0	100,000.0	105,505.1	110,780.3	116,319.3

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/OutCome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Memadainya Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPU	01 Tingkat/ Kesesuaian Kebutuhan Anggota dan Staf KPU Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan Sarana dan Prasarana Serta Kendaraan Operasional Untuk Daerah Pemekaran



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Nama Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum

3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
02	Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab
03	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif
04	Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
05	Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

4. Sasaran Strategis :

No	Mendukung Sasaran Strategis
01	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis
02	Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib
03	Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang

5. Kode Program : 076.01.06

6. Nama Program : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2014	Usulan Tahun 2015	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Rupiah		97,030.9			
a. Pendamping		0.0			
b. Non Pendamping		97,030.9			
2. PHLN atau PDN		0.0			
JUMLAH	0.0	97,030.9	101,882.4	106,976.6	112,325.4

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/OutCome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan).

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2015	Praktiraan Target				Satuan	Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPU)	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	01 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU 001 Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU 002 Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota 003 Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid 004 Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 005 Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat pembendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Pengelolaan Keuangan 006 Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang keormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	1	1	1	1	uknis/juklak	KL : 0	-	Biro Keuangan	
		01 Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.	75	90	90	90	Persen	KL : 0	-	Biro Logistik	
		001 Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja.	75	90	90	90	Persen	KL : 0	-		
		002 Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku.	75	90	90	90	Persen	KL : 0	-		
		003 Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusian logistik Pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah	75	95	95	95	Satker	KL : 0	-		
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu										

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2015	Praktiraan Target				Prioritas	Dukungan (PPP/ARc/KSST/MP1)	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	<p>01 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>001 Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL</p> <p>002 Prosentase (%) fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga lain</p> <p>003 Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</p> <p>004 Prosentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU</p> <p>005 Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia</p> <p>006 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur</p> <p>007 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu</p>	75	77.5	77.5	77.5	Persen	KL : 0	-	Biro Perencanaan dan Data
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawalan	<p>01 Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawalan Di Lingkungan Seten KPU</p> <p>001 Prosentase Pengajian Berkas Persyaratan Administrasi Kepegawalan Yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (TMT)</p> <p>002 Prosentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.</p> <p>003 Prosentase Pegawai Yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.</p> <p>004 Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU</p>	97	100	100	100	Persen	KL : 0	-	Biro Sdm

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2015	Praktiraan Target				Satuan	Prioritas (9)	Dukungan (PPP/AR/G/KSST/MPJ) (10)	Penanggung Jawab (11)
				2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		005 Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang tertuntaskan setiap bulan	12	12	12	12	Dokumen	KL : 0	-		
		006 Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi	75	25	25	25	Orang	KL : 0	-		
		007 Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	2	2	2	2	Naskah	KL : 0	-		
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	01 Tereleenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Seharhari Untuk KPU Seluruh Indonesia								Biro Umum	
		001 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat	85	90	90	90	Persen	KL : 0	-		
		002 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu.	100	100	100	100	Persen	KL : 0	-		
		003 Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	90	100	100	100	Persen	KL : 0	-		
		004 Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan	90	100	100	100	Persen	KL : 0	-		
		005 Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU.	1	1	1	1	draft	KL : 0	-		
		006 Jumlah KPU Provinsi yang telah menerapkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU.	33	33	33	33	provinsi	KL : 0	-		
		007 Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.	1	1	1	1	Laporan	KL : 0	-		
		008 Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilikada yang bersifat permanen kepada lembaga	33	33	33	33	Provinsi	KL : 0	-		
		009 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	80	100	100	100	Persen	KL : 0	-		
		010 Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement.	100	100	100	100	Persen	KL : 0	-		
		011 Persentase hasil notulensi rapat yang dapat	50	85	85	85	Persen	KL : 0	-		

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(0-1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2015	Praktiraan Target				Satuan	Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPPI)	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		012 Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU.	0	0	0	0	Kejadian	KL : 0	-		
		01 Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel								Inspektorat	
		001 Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawalan dan barang milik negara	15	17	18	20	Persen	KL : 0	-		
		002 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	65	67	70	75	Persen	KL : 0	-		
		003 Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	70	75	80	83	Persen	KL : 0	-		
		004 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20	50	75	100	Persen	KL : 0	-		
		005 Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100	100	100	100	Persen	KL : 0	-		
		006 Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	40	50	60	70	Persen	KL : 0	-		

Keterangan:

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang, 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP = Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2015	Praktiraan Target				Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPJ)	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	01 Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota 001 Persentase akumulasi kemajuan pengadaan meubelair dan belanja modal 002 Persentase akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal 003 'Akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional dan belanja modal untuk daerah pemekaran	0 80 80	0 80 80	0 100 100	0 100 100	Persen Persen Satker	KL : 0 KL : 0 KL : 0	- - -	Biro Umum

Keterangan:

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang, 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership, ARG= Anggaran Responsif Gender

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(06) PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2015	Praktiraan Target				Satuan	Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	01 Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhan 001 Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan 002 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU 003 Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepastian terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye 004 Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum 005 Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu								Biro Hukum	
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	01 Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 001 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada. 002 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja 003 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPIID 004 Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran 005 Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 006 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 007 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada 008 Jumlah pusat pendidikan pemilih								Biro Teknis dan Hupmas	

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(06) PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2015	Praktiraan Target				Satuan	Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPJ)	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		009 %Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan PemiluKada	75	75	75	75	Persen	KL : 0	-		

Keterangan :

Kolom (8) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang, 0 = Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP = Public Private Partnership, ARG = Anggaran Responsif Gender



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2015
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
UNIT ORGANISASI : **Komisi Pemilihan Umum**

Kode	Program	Alokasi 2014	Usulan Pendanaan Tahun 2015 (uta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (uta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah (8)=(4+5+6+7)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	0.0	937,199.0	0.0	0.0	0.0	937,199.0	957,484.6	1,005,358.8	1,055,626.8
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0	100,000.0	105,505.1	110,780.3	116,319.3
06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	0.0	97,030.9	0.0	0.0	0.0	97,030.9	101,882.4	106,976.6	112,325.4
TOTAL		0.0	1,134,229.9	0.0	0.0	0.0	1,134,229.9	1,164,872.1	1,223,115.7	1,284,271.5



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2015
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : Komisi Pemilihan Umum

Kode	Program	Alokasi 2014 (3)	Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah (4)	PHLN+PDN (5)	PMBP+BLU (6)	SBSN (7)	Jumlah (8)=(4+5+6+7)	2016 (9)	2017 (10)	2018 (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	0.0	937,199.0	0.0	0.0	0.0	937,199.0	957,484.6	1,005,358.8	1,055,626.8
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0	100,000.0	105,505.1	110,780.3	116,319.3
06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	0.0	97,030.9	0.0	0.0	0.0	97,030.9	101,882.4	106,976.6	112,325.4
TOTAL		0.0	1,134,229.9	0.0	0.0	0.0	1,134,229.9	1,164,872.1	1,223,115.7	1,284,271.5



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2015
(REKAPITULASI UNIT ESELON II)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
UNIT ORGANISASI : **Komisi Pemilihan Umum**

Kode	Unit Organisasi (Eselon II)	Alokasi 2014	Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)					Jumlah (8)=(4+5+6+7)	Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah (4)	PHLN+PDN (5)	PBBP+BLU (6)	SBSN (7)	2016 (9)		2017 (10)	2018 (11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
01	Biro Hukum	0.0	20,944.6	0.0	0.0	0.0	20,944.6	22,896.3	25,090.7	27,217.5	
02	Biro Keuangan	0.0	540,565.1	0.0	0.0	0.0	540,565.1	544,300.1	553,054.7	561,946.2	
03	Biro Logistik	0.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0	15,000.0	17,268.2	22,629.4	28,299.9	
04	Biro Perencanaan dan Data	0.0	50,322.0	0.0	0.0	0.0	50,322.0	53,837.6	62,147.2	70,936.2	
05	Biro Sdm	0.0	34,525.5	0.0	0.0	0.0	34,525.5	37,090.7	43,153.9	49,566.9	
06	Biro Teknis dan Hupmas	0.0	76,086.3	0.0	0.0	0.0	76,086.3	78,986.1	81,885.9	85,107.9	
07	Biro Umum	0.0	381,786.4	0.0	0.0	0.0	381,786.4	393,147.9	412,265.5	432,445.5	
08	Inspektorat	0.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0	15,000.0	17,345.2	22,888.4	28,751.4	
TOTAL			1,134,229.9	0.0	0.0	0.0	1,134,229.9	1,164,872.1	1,223,115.7	1,284,271.5	